

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI ISTISHNA'

A. Pengertian Istishna'

Lafal *Istishna'* berasal dari kata *shana'ah* ()¹ yang artinya membuat sesuatu. Kemudian ditambah *alif*, *sin* dan *ta'* menjadi *Istishna'* ()². Secara etimologi *Istishna'* artinya minta dibuatkan. Sedangkan menurut terminologi merupakan suatu kontrak jual beli antara penjual dan pembeli dimana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harganya yang dapat diserahkan secara bertahap atau dapat juga dilunasi. Sistem *Istishna'* adalah sistem pembiayaan atas dasar pesanan, untuk kasus ini dimana objek atau barang yang diperjual belikan belum ada.³ Menurut ulama fiqh *istishna'* sama dengan *salam* dari segi objek pesanannya yaitu sama-sama dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri dan kriteria khusus, sedangkan perbedaannya adalah jika *salam* pembayarannya dilakukan diawal sekaligus sedangkan *Istishna'* bisa dibayar di awal, angsuran dan bisa juga di akhir.⁴

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hlm. 221.

²*Ibid.*

³ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, Cet-1 (Jakarta: kencana prenada media group, 2010), hlm. 52.

⁴*Ibid.*

Menurut Wahbah Zuhaili *Istishna'* adalah:

تعريف الإِ ناع هو عقد مع صانع علي عمل شيء معين في الذمة,
العقد على شراء ما سيصنعه الصانع وتكون العين ولعمل من الصنع.

Artinya : *Ketahuilah Istishna' adalah suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut.*⁵

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*,

والاستصناع هو شراء ما يوضع

Artinya : *Istishna'' adalah membeli sesuatu yang dibuat sesuai dengan pesanan.*⁶

Istishna' secara etimologi adalah masdar dari *sishna a'asy-sya'i*, artinya meminta membuatkan sesuatu, yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan secara terminologi *Istishna'* adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerja pembuat barang itu.⁷

Dalam buku *Fiqh Muamalah* disebutkan, jual beli *istishna'* adalah jual beli antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerima pesanan (*shani'*) atas sebuah

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Cet-1 (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 253.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz. 4, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 69.

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.124.

barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*), contohnya untuk barang-barang industri maupun properti. Spesifikasi dan harga barang haruslah sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.⁸

Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *Istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.⁹

Dalam buku *Bank Islam* oleh Adiwarman A. Karim yang menjelaskan tentang fatwa DSN- MUI, terlihat bahwa jual beli *Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*).¹⁰

Transaksi jual beli *Istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 136.

⁹ Mardani, *Op.Cit*

¹⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 126.

pembayarannya, apakah pembayarannya dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang.¹¹

Menurut jumhur *fuqaha*, jual beli *Istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *as-salam*. Biasanya, jenis ini digunakan dibidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan jual beli *Istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan jual beli *as-salam*.¹²

Dari defenisi-defenisi yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli *Istishna'* adalah akad antara dua pihak dimana pihak pertama (orang yang memesan) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat/ produsen) untuk dibuatkan suatu barang. Pihak pertama disebut *mustashni'* sedangkan pihak kedua, yaitu penjual disebut *shani'*, dan sesuatu yang menjadi objek akad disebut *mushnu'* atau barang yang dipesan (dibuat).¹³

Akad *Istishna'* adalah akad yang menyerupai akad *as-salam*, karena bentuknya menjual barang yang belum ada (*ma'dum*) dan sesuatu yang akan dibuat itu pada akad ditetapkan dalam tanggungan pembuat sebagai penjual. Hanya saja ada beberapa perbedaan dengan *as-salam* karena:

1. Dalam *Istishna'* harga atau alat pembayaran tidak harus dibayar dimuka seperti pada akad *as-salam*.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet-1 (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm.113.

¹² *Ibid.*

¹³ Ahmad wardi Muslich, *Loc.Cit.*, hlm.253

2. Tidak ada ketentuan tentang lamanya pekerjaan dan saat penyerahan.
3. Barang yang dibuat tidak harus ada dipasar.¹⁴

Dalam redaksi lain, *as-salam* berlaku untuk barang yang dibuat dan lainnya. Adapaun *Istishna'* khusus bagi sesuatu yang disyaratkan untuk membuatnya. Dalam *as-salam* juga disyaratkan membayar dimuka, sedangkan *Istishna'* tidak disyaratkan demikian.¹⁵

Sebagai bentuk jual beli, *Istishna'* mirip dengan *as-salam*. Namun, ada beberapa perbedaan diantaranya adalah:

1. Objek *as-salam* selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek *Istishna'* bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu.
2. Harga dalam akad *as-salam* harus dibayar penuh dimuka, sedangkan harga dalam *Istishna'* tidak harus dibayar penuh dimuka melainkan dapat juga dicicil atau dibayar dibelakang.
3. Akad *as-salam* tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam *Istishna'* akad dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi.
4. Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad *as-salam*, namun dalam akad *Istishna'* tidak merupakan keharusan.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵ Mardani, *Op.Cit.*, hlm. 125.

B. Dasar Hukum Jual Beli *Istishna'*

Secara umum landasan syariah yang berlaku pada jual beli *salam* juga berlaku pada jual beli *Istishna'*, sungguh demikian, para ulama membahas lebih lanjut keabsahan jual beli *Istishna'* dengan penjelasan sebagai berikut. Menurut mazhab Hanafi, jual beli *Istishna'* termasuk akad yang dilarang. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak jual penjualan harus ada dan dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak jual beli *Istishna'* atas dasar *Istihsan* karena alasan berikut ini.¹⁶

1. Masyarakat telah mempraktekan jual beli *Istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *Istishna'* sebagai kasus *Ijma'* atau *consensus* umum.¹⁷
2. Jual beli *Istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah.¹⁸
3. Keberadaan jual beli *Istishna'* berdasarkan kebutuhan masyarakat. Banyak yang sering terjadi barang yang tidak tersedia dipasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.¹⁹

¹⁶ M. Syafi'i Antonio, *Op.Cit*, hlm. 114.

¹⁷ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, Cet-1 (Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 53.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ M. Syafi'i Antonio, *Loc. Cit*.

4. Didalam syariah dimungkinkan adanya penyimpanan terhadap *qiyas* berdasarkan *ijma'* ulama.²⁰

Dalam buku *fiqh muamalah* oleh Ahmad Wardi Muslich, dijelaskan bahwa menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *Istishna'* dibolehkan atas dasar akad *as-salam* dan kebiasaan manusia. Syarat-syarat yang berlaku pada *salam* juga berlaku untuk *Istishna'*. Diantara syarat tersebut adalah penyerahan seluruh harga (alat pembayaran) didalam majlis akad, seperti halnya akad *salam*, menurut Syafi'iyah *Istishna'* itu hukumnya sah, baik masa penyerahan barang dibuat (dipesan) ditentukan atau tidak, termasuk apabila diserahkan secara tunai.²¹

Sebagian *fukah kontemporer* berpendapat bahwa jual beli *Istishna'* adalah sah atas dasar *qiyas* dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga terjadinya kemungkinan perselisihan atas dasar jenis dan kualitas suatu barang dapat di minimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.²²

Istishna' merupakan salah satu pengembangan jual beli *as-salam*, waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara pembayarannya dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan. Karena jual beli *Istishna'* merupakan khusus dari jual beli *as-salam* maka landasan hukum syariah jual beli

²⁰ *Ibid.*

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Loc. Cit.*, hlm. 254.

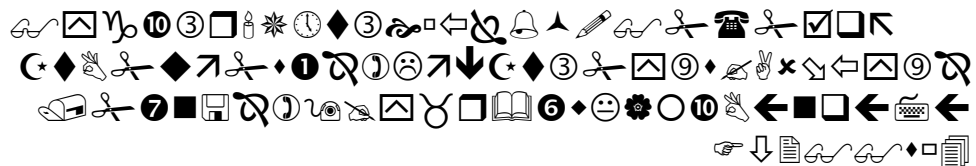
²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 254.

Istishna' mengikuti ketentuan jual beli *as-salam*. Dalil yang membolehkan *Istishna'* adalah sebagai berikut:

1. Landasan al-Quran

Dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan persoalan ibadah, al-Quran mengatur dan memberikan secara rinci. Sementara dalam masalah-masalah muamalah, al-Quran memberikan gambaran secara global (umum), termasuk juga dalam masalah jual beli dengan *Istishna'*.

Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 282:



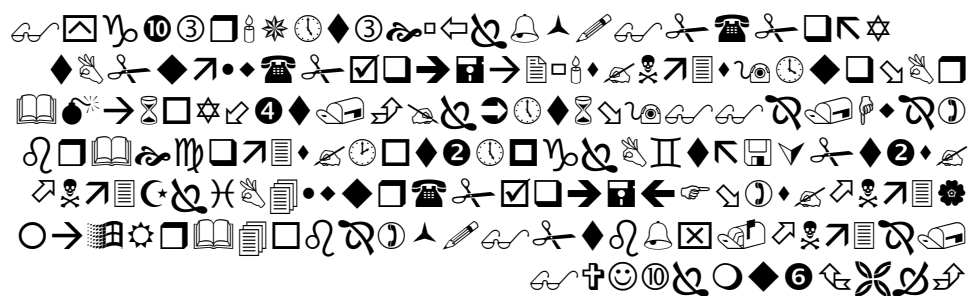
Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S. Al-Baqarah : 282).²³*

Dari ayat diatas telah jelas dikemukakan dalam Islam pelaksanaan jual beli *Istishna'* bahwa pembeli membayar pada masa penangguhan yang terlebih dahulu disepakati kapan pembayaran dilakukan. Maka diharuskan menuliskannya dan adanya kesaksian dari kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, maka jika memungkinkan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Hali ini dikarenakan jika

²³ Depertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Tangerang: Panca Cemerlang, 2010), hlm. 48.

kedua belah pihak dapat dipercaya atau terkadang salah satunya meninggal dunia, sehingga tidak dapat diketahui lagi pihak penjual atas pembeli dan sebaliknya.

Kemudian dalam al-Quran juga dijelaskan bahwa dalam jual beli harus bebas memilih jika ada unsur pemaksaan tanpa hak jual beli tidak sah berdasarkan firman Allah Swt surat an-Nisa ayat 29:



Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*(Q.S. An-Nisa: 29).²⁴

Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara bathil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya

²⁴Depertemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm.83.

dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara'.²⁵

2. Landasan As-Sunnah

Nabi Muhammad SAW bersabda:

الْقَاسِمُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَالْأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual.(H.R. Ibnu Majah)²⁶*

3. Landasan Ijma'

Menurut mazhab Hanafi, jual beli *Istishna'* termasuk akad yang dilarang karena secara *qiyasi* (prosedur analogi) bertentangan dengan semangat jual beli dan juga termasuk jual beli *ma'dum* (jual beli yang masih belum ada). Dalam jual beli kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sementara dalam *Istishna'* pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian,

²⁵ H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 258.

²⁶ Hafiz Ibnu Abdillah, *Sunan Ibnu Majjah*, (Beirut: Darr Al-Fikr, 1998), hlm. 217.

mazhab Hanafi menyetujui kontrak *Istishna'* atas dasar *Istihsan* (menganggapnya baik) karena alasan sebagai berikut:

- a. Masyarakat telah mempraktekan jual beli *Istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal inilah yang melatar belakangi perbedaan ulama dalam menghukumi jual beli *Istishna'*.
- b. Didalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas*, dan hal ini telah menjadi konsensus ulama (sudah *ijma'*).
- c. Keberadaan jual beli *Istishna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang yang diperlukan tersebut.
- d. Jual beli *Istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah.²⁷

C. Rukun dan Syarat Jual Beli *Istishna'*

1) Rukun Jual Beli *Istishna'*

Rukun dari *Istishna'* yang harus terpenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 114.

- a. Pelaku akad, yaitu *mustashni'* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *shani'* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
- b. Objek akad, yaitu barang (*mashnu'*) dengan spesifikasinya dan harganya.
- c. *Shighot* yaitu *ijab* dan *qabul*.²⁸

Adapun penjelasan lebih jelas mengenai rukun transaksi *Istishna'* meliputi:²⁹

- a. Transaktor, yakni pembeli (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*)

Transaktor terdiri atas pembeli dan penjual kedua transaktor diisyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan memiliki kemampuan yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain yang sejenis. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual diperbolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.³⁰

- b. Objek akad meliputi barang dan harga barang *Istishna'*

²⁸ Ascarya, *Op.Cit.*, hlm. 97.

²⁹ Rizal Yahya, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba, 2009), hlm. 254.

³⁰ *Ibid.*

Hukum objek akad transaksi jual beli *Istishna'* meliputi barang yang diperjual belikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang *Istishna'* DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut adalah:³¹

1. Harus jelas spesifikasinya.
 2. Penyerahannya dilakukan kemudian.
 3. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan.
 4. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
 5. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan.
 6. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati.
 7. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang massal.
- c. Ijab dan kabul yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli *Istishna'* kedua belah pihak.

Ijab dan qabul *Istishna'* merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, dengan cara penawaran dari penjual dan penerima yang dinyatakan oleh pembeli. Pelaksanaan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun tulisan. Tergantung pada praktek yang lazim di masyarakat dan

³¹*Ibid.*

menunjukkan keridhaan satu pihak untuk penjual barang *Istishna'* dan pihak pembeli barang *Istishna'*. Dan pada dasarnya *Istishna'* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya.
- b. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.³²

2) Syarat Jual Beli *Istishna'*

Syarat jual beli *Istishna'* menurut pasal 104 s/d pasal 108 kompilasi hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:³³

- a. Jual beli *Istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
- b. Jual beli *Istishna'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.
- c. Dalam jual beli *Istishna'* identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan.
- d. Pembayaran dalam jual beli *Istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
- e. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak boleh satupun tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.

³²*Ibid.*

³³ Mardani, *Loc. Cit*, hlm. 125-126.

- f. Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pesanan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

Adapun syarat yang diajukan ulama untuk memperbolehkannya transaksi jual beli sistem pesanan adalah:

1. Adanya kejelasan jenis, ukuran, macam dan sifat barang karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.
2. Merupakan barang yang biasa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan antar manusia. Dalam arti, barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia.
3. Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, jika jangka waktu penyerahan barang ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad *as-salam*, menurut pandangan Abu Hanifah.³⁴

D. Penetapan Waktu Penyerahan Barang

Dalam akad jual beli *Istishna'* waktu penyerahn barang tidak merupakan keharusan. Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad *Istishna'* pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimal yang berarti

³⁴ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 201.

bahwa jika perusahaan terlambat memenuhi, pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya.³⁵

Hukum objek akad transaksi jual beli *Istishna'* meliputi barang yang diperjual belikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang *Istishna'* DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut adalah:

- a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- b. Harus jelas spesifikasinya.
- c. Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan.
- g. Memerlukan proses pembuatan setelah akan disepakati.³⁶
- h. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan baranga massal.³⁷

³⁵ Rizal Yahya, dkk. *Loc. Cit.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Mardani, *Op. Cit*, hlm 131.

- i. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak pilih) untuk melanjutkan atau membatalkan.³⁸

Meskipun jual beli *Istishna'* dibolehkan dalam Islam, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memenuhi aturan-aturan hukum Islam. Seperti penipuan terhadap banyaknya barang pesanan yang tidak sesuai dengan pembayaran yang tidak tepat pada waktu, merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam, karena ini merupakan penzaliman karena tidak sesuai dengan akad.

Yusuf Qardhawi menjelaskan tentang bentuk jual beli sebagai berikut:

1. Jual beli yang membawa kepada kemaksiatan adalah terlarang (haram) misalnya babi, khamar, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum.
2. Transaksi jual beli yang samar dan belum jelas hasilnya atau barang tersebut tidak dapat diserahkan kepada pembeli. Seperti menjual buah-buahan yang masih dipohon, menjual burung diudara semuanya diharamkan apabila ada unsur penipuan.
3. Islam memberikan kebebasan jual beli pada setiap orang maka persaingan yang sehat juga dibenarkan.
4. Jual beli yang diberantas islam adalah membeli atau menjual sesuatu yang diketahui sebagai hasil perampokan, cucian atau yang diperoleh secara tidak benar.³⁹

³⁸*Ibid.*

M. Qurais Shihab menetapkan empat prinsip dalam ekonomi Islam: tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Selanjutnya, dalam menetapkan etika bisnis ia merincikan sebagai berikut:

- a. Kejujuran
- b. Keramahtamahan
- c. Penawaran yang jujur
- d. Pelanggan yang tidak sanggup membayar diberi waktu
- e. Tegas dan adil dalam timbangan dan takaran
- f. Tidak dibenarkan monopoli
- g. Tidak dibenarkan adanya harga komoditi yang boleh dibatasi
- h. Kesukarelaan.⁴⁰

Adapun ketentuan pembayaran menurut fatwa tentang jual beli *Istishna'* adalah sebagai berikut:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang ataupun manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembayaran utang.⁴¹

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu. 1980), Cet. ke-6, hlm. 311.

⁴⁰ Umar Sihab, *Al-Quran Kontekstualitas*, (Jakarta: Permadani, 2005), Cet. ke-3, hlm. 295.

⁴¹ Mardani, *Loc. Cit.*

Ketentuan lain dalam jual beli *Istishna'* sebagai berikut:

- a. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
- b. Semua ketentuan dalam jual beli *as-salam* yang tidak disebut diatas berlaku pula pada jual beli *Istishna'*.
- c. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.⁴²

E. Hikmah-Hikmah Jual Beli Istishna'

Setiap apapun yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya pasti mempunyai hikmah-hikmah yang terkandung didalamnya. Akan tetapi, karena kesibukan manusia itu sendiri, terkadang manusia tidak pernah merasakan hikmah yang terkandung di dalamnya. Manusia tidak biasa menyingkap rahasia dari apa yang telah Allah SWT isyaratkan. Tidak jarang manusia menganggap bahwa jika apa yang terjadi pada dirinya tidak sesuai dengan harapan, maka mereka terkadang menganggap Allah SWT tidak adil atau hal-hal lainnya yang semuanya itu bisa menutup pintu dibukanya rahmat.

Begitu pun hikmah yang terkandung dalam sistem jual beli *Istishna'* (pesanan) adalah:

⁴²*Ibid.*

1. Untuk mempermudah manusia dalam bermuamalat.
2. Untuk mensejahterakan ekonomi manusia.
3. Merupakan kebutuhan masyarakat yang memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar.
4. Orang yang mempunyai perusahaan seringkali butuh uang untuk memenuhi kebutuhan perusahaannya, bahkan sewaktu-waktu bisa menjadi kendala atas kemajuan perusahaan.
5. Sebagai media tolong-menolong antara manusia yang satu dengan yang lainnya.⁴³

⁴³Dalam<http://www.mahir-al-hujjah.blogspot.com/2009/10jual-beli-kaitan-dengannya.html> (22 April 2015)